

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan dan pendapatan terbesar negara adalah pajak. Pajak menjadi sumber utama dalam penerimaan negara. Dalam Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan yang turut berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Untuk itu, diharapkan masyarakat juga menjaga proyek yang ada untuk dapat dipakai bagi kepentingan bersama. Sebagaimana diketahui bahwa dalam APBN yang dibuat oleh pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi), dan penerimaan dari sektor bukan pajak.

Dalam APBN, penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan seperti pelayanan kesehatan, fasilitas dan infrastruktur, penanggulangan bencana, pendidikan, subsidi pangan, BBM, transportasi massal, dan sebagainya. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPH) sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas penjualan barang mewah (PPnBM), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan bea cukai, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berita *online* tribbunnews.com menyatakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia untuk tahun 2018 diperkirakan hanya bisa sekitar 80% sampai 82% yang masih jauh dibawah target yang dibebankan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp 1.294 triliun. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap pajak masih rendah atau wajib pajak di Indonesia enggan untuk melaporkan bahkan membayarkan pajaknya (Surahman dan Putra, 2018).

Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011) salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Upaya meminimalkan beban pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan berbagi cara, mulai dari yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan sampai dengan yang sudah melanggar koridor peraturan perpajakan (Ika Fitriyanti et al., 2017). Berbagai teori telah dikemukakan untuk merespons kejahatan pajak. Pendekatan ekonomi klasik

menyatakan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi dan denda yang berat muncul sebagai strategi yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan pajak (Allingham & Sandmo, 1972) dalam (Basri, 2014). Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mujiyati dan Aris, 2016). Wajib pajak berperilaku sebagai agen rasional yaitu keputusan untuk melakukan kecurangan pajak tergantung pada besarnya risiko yang dihadapi. Di Indonesia, masyarakat yang memiliki penghasilan melebihi PTKP diwajibkan untuk membayar pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak bisa berasal dari pekerjaan, usaha atau pekerjaan bebas, investasi, atau modal, dan lain-lain. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang Perpajakan paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan atau dikukuhkannya sebagai PKP.

Peraturan perpajakan terbaru pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang tarif pajak penghasilan final UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang memberikan kontribusi pajak sebesar 0,5% dari omzet yang dihasilkan sangat mendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan. Disisi lain Peraturan Pemerintah No. 23 yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2018 juga dapat mendorong wajib pajak untuk lebih paham administrasi pajak dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Adapun batasan omzet pengusaha UMKM yang bisa menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini

adalah sebesar 4,8 miliar pertahun. Dalam dunia UMKM masih dijumpai kasus pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Kesehatan yang berasal dari Singapura yaitu PT RNI. Modus yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan khusus UMKM dengan tarif yang berlaku pada saat itu sebesar 1% dengan tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak tahun 2007-2015 oleh dua pemegang saham PT RNI.

Berdasarkan kejadian pelanggaran yang timbul dalam dunia perpajakan, pemerintah melakukan reformasi pajak agar penerimaan negara menjadi optimal. Reformasi pajak bertujuan untuk mengokohkan kemandirian bangsa dalam membiayai pertumbuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustained development growth*) sehingga mampu mengurangi ketergantungan negara terhadap sumber dana asing yang berbiaya mahal dan menekan APBN dari tahun ke tahun. Reformasi pajak juga mengakibatkan timbulnya pertentangan diametral antara fiskus dan wajib pajak. Di Indonesia, usaha-usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak erat kaitannya dengan pemahaman tentang perpajakan. Wajib pajak yang paham akan peraturan perpajakan cenderung akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan sadar bahwa membayar pajak begitu penting bagi keberlangsungan kesejahteraan negara. Disisi lain masih banyak wajib pajak mengabaikan

pentingnya peraturan perpajakan dan cenderung melakukan pelanggaran dengan segala tindakan tidak etis yang menguntungkan dirinya sendiri. Mengingat pembayaran pajak diwajibkan oleh wajib pajak yang tidak diberikan imbal balik secara langsung maka timbulah rasa tidak rela dalam mengeluarkan uang untuk membayar pajak. Seseorang yang memiliki tingkat kecintaan terhadap uang yang tinggi lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak (Tang dan Chiu, 2003). Dalam penelitian Surahman dan Putra (2018) menyimpulkan bahwa orang yang memiliki kecintaan pada uang yang begitu besar, orang tersebut akan menempatkan uang sebagai hal yang sangat penting. Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi otomatis beban terutang pajak yang ditanggung pun jumlahnya akan besar. Oleh karena itu, tiba waktunya untuk membayar pajak, wajib pajak merasa tidak sepenuhnya rela dalam mengeluarkan uang mereka dengan jumlah yang besar.

Peran pajak dalam menjaga kemaslahatan manusia juga dapat dilihat dari setiap ajaran agama yang menganjurkan umatnya untuk taat kepada pemerintah, termasuk didalamnya taat membayar pajak. Pemahaman ajaran agama menjadi kewajiban setiap orang untuk melaksanakannya. Faktor keagamaan atau religiusitas dapat menekan timbulnya tindakan penggelapan pajak. Karena dalam agama telah diatur bahwa semua yang melakukan tindakan tercela dan merugikan akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Keagamaan atau religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia (Mohlis, 2009). Dengan adanya tingkat kesadaran terhadap agama

akan membuat individu untuk tidak melakukan hal tercela seperti tindakan penggelapan pajak yang berdampak buruk bagi penerimaan negara.

Terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi timbulnya penggelapan pajak (*tax evasion*) seperti norma subjektif. Menurut Surahman dan Putra (2018) norma subjektif diartikan sebagai keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensinya. Dalam kehidupan bermasyarakat, individu cenderung akan meniru individu lain dalam bertindak untuk suatu hal. Misalnya dalam kewajiban membayar pajak terdapat individu lain yang begitu taat sebagai warga negara dalam memberikan kontribusinya berupa pembayaran pajak setiap bulannya, sehingga tindakan individu tersebut akan mendorong individu lain untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tidak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Begitu juga dalam dunia perpajakan, wajib pajak akan melihat lingkungan sekitar dalam mematuhi aturan perpajakan.

Terdapat faktor lain mengenai penggelapan pajak yaitu kemungkinan terdeteksi kecurangan (Indriyani, et al. 2016). Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *tax evasion* (Pulungan, 2015). Jadi, semakin tinggi tingkat terdeteksi kecurangan yang dilakukan melalui pemeriksaan pajak maka wajib pajak akan

patuh terhadap peraturan perpajakan dan menghindari perilaku tidak etis seperti penggelapan pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Perpajakan, misalnya wajib pajak tidak melaporkan secara benar berapa pendapatan yang dimiliki (Siahaan, 2010). Penggelapan pajak dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (*loopholes*), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan (Rahman, 2013). Penggelapan pajak terjadi pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) belum dikeluarkan. Aspek etika atas penggelapan pajak dari perspektif agama dan sekuler (duniawi) adalah isu terbaru yang masuk dalam pertimbangan pengambilan persepsi wajib oleh wajib pajak terhadap penggelapan pajak (Dharma, 2016). Cohn (1998) dalam McGee (2008) memeriksa literatur Yahudi dan menyimpulkan bahwa penggelapan pajak selalu tidak etis. Salah satu alasan untuk kesimpulan tersebut karena ada tekanan pemikiran didalam literatur Yahudi bahwa terdapat kewajiban untuk tidak meremehkan orang Yahudi yang lain. Jika seorang Yahudi melakukan penggelapan pajak, hal itu akan membuat semua orang Yahudi lainnya terliha buruk.

Penggelapan pajak bisa saja dianggap etis jika dikaitkan dalam kondisi atau alasan tertentu. Oleh karena itu, wajib pajak cenderung lebih memilih *tax*

evasion daripada *tax avoidance*. Karena dalam *tax avoidance* wajib pajak harus benar-benar mengetahui seluk-beluk Undang-Undang Perpajakan, sehingga mereka akan mengetahui cara yang akan ditempuh untuk melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan. Cara yang digunakan dalam *tax avoidance* adalah cara yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perpajakan atau disebut dengan penghindaran pajak secara legal. Contoh kasus yang tercatat sebagai penggelapan pajak di Indonesia yaitu menurut Direktorat Jenderal Pajak terdapat sebanyak 23 kasus dengan kerugian Rp 194 miliar yang terjadi pada tahun 2011, kemudian 23 kasus dengan kerugian Rp 326 miliar pada tahun 2012, dan 20 kasus dengan kerugian Rp 239 miliar pada tahun 2013. Penggelapan pajak erat kaitannya dengan etika dan moralitas wajib pajak. Etika dan perilaku seseorang akan mendorong individu untuk membayar pajak atau malah bersikap negatif dengan melakukan kecurangan pajak (Kirchler et al., 2008) dalam (Basri, 2014). Oleh karena itu peran negara dalam hal ini sangat dibutuhkan demi terciptanya keselarasan dan kesejahteraan negara itu sendiri. Disisi lain, negara perlu melakukan segala kegiatan yang mengandung unsur tentang pengetahuan pajak agar wajib pajak sadar betapa pentingnya membayar pajak dan melaporkan jumlah pembayaran pajak yang sebenarnya.

Surahman dan Putra (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak*” meneliti aspek persepsi dalam penggelapan pajak yaitu pemahaman perpajakan, norma subjektif, *love of money*, dan religiusitas. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa aspek persepsi yang berpengaruh dalam penggelapan pajak (*tax evasion*) meliputi pemahaman pajak dan religiusitas. Kemudian dalam penelitian Basri (2015) yang berjudul “*Pengaruh Gender, Religiusitas, dan Sikap Love of Money pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi*” memberikan hasil bahwa gender dan religiusitas tidak berpengaruh pada etika penggelapan pajak, dan *love of money* berpengaruh pada etika penggelapan pajak. Semakin tinggi *love of money* maka persepsi terhadap etika penggelapan pajak juga tinggi, hasil tersebut konsisten dengan penelitian Tang dan Chiu (2003) serta Lau et al. (2013).

Misalnya kasus korupsi uang pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan pada tahun 2009 menimbulkan negara mengalami kerugian yang besar dalam penerimaannya. Kejadian tersebut dapat memberikan citra buruk masyarakat dalam dunia perpajakan di Indonesia. Dengan demikian peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menciptakan kondisi lingkungan yang baik dan sejahtera serta bebas dari korupsi. Wajib pajak menjadi faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern sebagai salah satu penggerak ekonomi negara yang berhasil meningkatkan penerimaan pajak negara. Keberhasilan *self assessment* sebagai kunci utama pengumpulan pajak adalah terletak pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak.

Melalui kepatuhan ini, administrasi pajak dapat memberdayakan sumber dayanya untuk lebih efisien dan efektif. Isu kepatuhan ini dikaitkan dengan penyelundupan atau penggelapan pajak (*tax evasion*) dan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang perpajakan yang sampai

sekarang masih belum terselesaikan. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak disebabkan karena masalah keteladanan yang memburuk terutama bila keteladanan yang kurang terpuji datang dari jajaran pemerintah sebagai pengelola pajak. Jika pemerintah mampu memberikan teladan yang baik maka masyarakat akan lebih mudah untuk menyadari betapa pentingnya pajak bagi kehidupan dan masa depan negaranya.

Pemerintah juga melakukan berbagai upaya seperti pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk mengetahui kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Jika dalam pemeriksaan pajak terdeteksi kecurangan. Wajib pajak ketahuan melakukan tindakan penggelapan pajak maka akan dikenakan denda yang jumlahnya melebihi dari jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. dengan keadaan tersebut menjadikan wajib pajak patuh dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya penggelapan pajak (Indriyani et al., 2016). Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penggelapan pajak adalah pemahaman perpajakan, *love of money*, religiusitas, norma subjektif, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan.

Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Rachmadi, 2014:20). Menurut Sholichah (2005) pemahaman wajib pajak terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan serta sikap wajib pajak

mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Penelitian mengenai pemahaman perpajakan dilakukan oleh Surahman dan Putra (2018) yang memberikan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitiannya konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2016) yaitu pemahaman perpajakan mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Penelitian lain juga dilakukan oleh Yezzie (2017) yang memberikan hasil bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Love of money atau *money ethics* yaitu sikap cinta terhadap uang yang dimiliki oleh setiap orang dalam mencapai titik kesuksesannya. Penelitian mengenai *love of money* dilakukan oleh Surahman dan Putra (2018) memberikan hasil bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitiannya mengenai tidak berpengaruhnya *love of money* disebabkan adanya faktor lain yang mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak yaitu kontrol berperilaku yang mendorong wajib pajak berperilaku patuh terhadap peraturan perpajakan. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lau et al. (2013) dalam mangoting (2014) yang memberikan hasil bahwa *love of money (money ethics)* berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan yang disertai komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Allah

(McDaniel dan Burne, 1992) dalam Basri (2015:65). Religiusitas merupakan dorongan yang ada dalam diri individu untuk berbuat baik sebagaimana mestinya yang diatur dalam agama, seperti yakin akan keberadaan Tuhan, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya. Menurut Glock dan Stark (1966) dalam Ancok dan Suroso (1994:76) religiusitas merupakan sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan dan berpusat pada persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*). Agama berperan penting dalam kehidupan manusia. Agama dapat memberikan kontrol perilaku untuk tindakan yang tidak etis dan ilegal terutama penggelapan pajak. Cara seseorang menilai sesuatu itu etis atau tidak etis dilakukannya kecurangan pajak tidak terlepas dari keyakinan yang dianutnya. Komitmen seseorang terhadap agama akan mempengaruhi perilakunya (Hafizhah, 2016). Penelitian mengenai religiusitas dilakukan oleh Surahman dan Putra (2018) yang memberikan hasil bahwa religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa sikap religiusitas yang ada dalam diri seseorang dapat mengendalikan setiap perbuatan yang dilakukannya. Namun penelitian yang dilakukan oleh Basri (2015) menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007).

Norma subjektif berhubungan dengan lingkungan. Kondisi lingkungan yang baik (taat aturan) dalam kaitannya dengan perpajakan akan mendorong masyarakat untuk sadar akan pentingnya membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Norma subjektif berupa faktor sosial yang diartikan sebagai tingkat dimana seseorang individu menganggap bahwa orang lain meyakinkan dirinya bahwa dia harus menggunakan sistem baru (Fatchan dan Hastuti, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shamsudin (2013), Mustikasari (2007), serta Wanarta dan Mangoting (2014) memberikan hasil bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Kemungkinan terdeteksi kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan pemeriksaan (Rahman, 2013). Penelitian mengenai kemungkinan terdeteksi kecurangan dilakukan oleh Indriyani et al. (2016) yang memberikan hasil bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Penelitian kemungkinan terdeteksi kecurangan juga dilakukan oleh Marlina (2018) yang memberikan hasil bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Surahman dan Putra (2018) yang berjudul “*Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman dan religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak

mengenai etika penggelapan pajak, sementara itu norma subjektif dan *love of money* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dalam penelitian ini penulis menambah satu variabel independen yaitu kemungkinan terdeteksi kecurangan.

Berdasarkan latar belakang diatas yang menunjukkan berbagai hasil berbeda dari penelitian terdahulu, maka hal ini mendorong penulis untuk meneliti kembali penelitian tentang *tax evasion* dengan judul : **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, *LOVE OF MONEY*, RELIGIUSITAS, NORMA SUBJEKTIF, DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSI KECURANGAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGSELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*) Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) ?
2. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ?

4. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ?
5. Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *love of money* terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis mengenai tindakan penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Wajib pajak membuat motivasi penilaiannya sendiri mengenai pemahaman pajak yang dimiliki, mengurangi tingkat rasa cinta terhadap uang dalam hal ini mengeluarkan uang dengan ikhlas untuk membayar pajak, meningkatkan pemahaman dalam agama karena kehidupan manusia diatur oleh agama untuk mencapai kesejahteraan hidup didunia dan akhirat, memotivasi diri dengan masukan yang diberikan oleh lingkungan sosial untuk patuh terhadap aturan perpajakan, dan melakukan pengisian SPT dengan benar. Seseorang akan taat dan patuh untuk membayar pajak ketika melakukan pengamatan langsung adanya kontribusi pajak dalam pembangunan di daerahnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai informasi penggelapan pajak dan mengetahui dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu wajib pajak dapat membentuk perilaku etis sejak dini yang mencerminkan taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang lebih jelas dan sistematis yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini. Secara garis besar dari masing-masing bab dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini berisi landasan teori yang terdiri dari teori pembelajaran sosial, teori persepsi, teori atribusi, dan *theory of planned behavior*, penjelasan umum tentang etika yang terdiri dari pengertian etika dan jenis-jenis etika, tinjauan umum tentang pajak, penjabaran dan penjelasan dari variabel dependen yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*), variabel independen yaitu pemahaman perpajakan, *love of money*, religiusitas, norma subjektif, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan. Selain itu juga terdapat tinjauan mengenai penelitian terdahulu, keterkaitan antar variabel dan perumusan hipotesis, serta kerangka pemikiran.

BAB III merupakan metode penelitian. Bab ini berisi tentang dasar dilakukannya penelitian yaitu jenis penelitian, penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, karakteristik responden, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian yang dilakukan.